BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pemerintahan demokrasi merupakan sebagai bentuk pemerintahan yang cukup banyak dianut oleh Negara-negara di dunia. Salah satunya negara Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari, istilah ini sering tendengar semenjak Indonesia merubah system dari system otoriter menjadi system demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan suara, pendapat, hingga aspirasi- aspirasi mereka demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang dapat terjalani seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat. Untuk mencapai tujuan dari UUD 1945 dibentuklah peradilan Mahkamah Konstitusi agar penyelenggaraan Negara itu berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Peradilan semacam ini berposisi sebagai pemisah dan penyeimbang antar lembaga di pemerintahan agar tidak ada dominasi kepentingan.

Pasal 24C ayat (9) UUD 1945 menyatakan mahkamah kosntitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan. Dengan kewenangan ini mahkamah konstitusi menjadi lembaga Negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif. Salah satunya tugas dan wewenang yang diemban oleh mahkamah konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman adalah melakukan *judicial riview*,

peninjauan dan pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi atau eksekutif.¹

Aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU pemilu) dengan pemaknaan baru melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menolak untuk seluruhnya permohonan yang di ajukan Brahma Aryana (mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang menggugat pasal syarat usia calon presiden dan wakil presiden) dalam putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut dibacakan oleh ketua mahkamah konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang yang digelar pada rabu (29/11/2023) di ruang sidang pleno MK.

Dalam pertimbangan yang disampaikan oleh hakim konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh, MK menegaskan, adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan, maka syarat usia untuk mencalon diri dalam jabatan public telah diatur dalam undang-undang. Untuk posisi presiden dan calon wakil presiden yang ditetapkan 40 (empat puluh) tahun (pasal 169 huruf q UU 7/2017). Sementara itu calon gubernur dan wakil gubernur berusia setidaknya 30 (tiga puluh) tahun. Adapun untuk calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota, batas usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. (pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 mengenai pemilihan kepala daerah, bupati, dan walikota. Hal ini menunjukkan

¹ Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2 (2024), 136

adanya rancangan kebijakan hukum dari pembuat undang-undang.

Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan terhadap penetapan batas usia seperti ini kemungkinan bertujuan untuk memberikan ruang bagi seseorang yang ingin meniti karier sebagai kepala daerah, dimulai dari level terendah seperti kota atau kabupaten, lalu berlanjut ke tingkat provinsi.²

UUD 1945 pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia dewasa mempunyai hak memilih yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4) yang berbunyi; “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis”.³

Konstitusi keadilan social merupakan pengertian lain dari konstitusi social. Konstitusi social memuat pengertian dalam dua dimensi. Pertama, konstitusi social berisi norma-norma yang mengatur kebijakan-kebijakan pokok berkenaan dengan perkehidupan social masyarakat. Kedua, konstitusi social merupakan hal yang dapat dijadikan pegangan normatif bersama bagi setiap warga dalam bergaul antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki tiga jenis amar putusan. Pertama, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima

² Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³ Demi K, Berdasarkan K, Yang M, Esa.

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_p13puu72009.pdf, diakses pada tanggal 4 juli 2024

⁴ Marhaendra Wija Atmaja, *Konstitusi Keadilan Sosial Dan Berkelanjutan*, (Denpasar:

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Universitas Udayana, 2016), 4.

(*niet ontvankelijke verklaard*), biasanya diberikan jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Kedua, putusan yang mengabulkan permohonan, artinya permohonan tersebut dianggap memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiga, putusan yang menolak permohonan, yang berarti permohonan tersebut tidak memiliki alasan hukum yang cukup.⁵

Mahkamah konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (UU pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia paling rendah 40 tahun. Para pemohon meminta MK untuk menurunkan syarat usia capres dan cawapres dengan alasan bahwa syarat tersebut diskriminatif bagi kelompok orang muda, seperti yang diadilkan pada permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023.⁶

Kebebasan berpendapat atau mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya.

Dalam kamus hukum, istilah “yuridis” berasal dari kata *yuridisch* yang

⁵ Wahyuni W. Hal yang Bisa Dilakukan Mahasiswa Hukum Pasca Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres. Hukum online.com. Published November 17, 2023. Accessed September 14, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hal-yang-bisa-dilakukan-mahasiswa-hukum-pasca-putusan-mk-batas-usia-capres-cawapres>, diakses pada tanggal 4 juli 2024

⁶ Batas Usia Capres-Cawapres Bukan Isu Konstitusional - pshk.or.id. Published

October 4, 2023. Accessed September 14, 2024. <https://pshk.or.id/aktivitas/batas-usia-capres-cawapres-bukan-isu-konstitusional/> , diakses pada tanggal 7 juli 2024

berarti menurut hukum dan atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti berdasarkan hukum atau dari sudut pandang hukum. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah kegiatan mengkaji dan menelaah suatu hal secara mendalam untuk dapat memahaminya dari sisi hukum.⁷

Berdasarkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan MK dalam perkara 90/PUU-XXI/2023, yang sebagian permohonannya dikabulkan. Putusan tersebut berkaitan dengan ketentuan usia minimum capres dan cawapres, dengan syarat calon tersebut pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Alasan yang mendasari putusan ini adalah karena presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menentukan batas usia dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

Disisi lain UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: setiap individu memiliki hak untuk tetap mengembangkan potensi dirinya dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka juga berhak memperoleh pendidikan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidupnya dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh manusia. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia dewasa mempunyai hak memilih yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4) yang berbunyi; “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Tinjauan Yuridis**

⁷ Widihartati Setiasih, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Skripsi (Universtas Darul ulum Islamic Centre sudirman Guppi (Undaris), 2020), 12.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Batas Usia Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rangka Pembatasan Hak Politik Dan Keadilan Konstitusional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor. 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam rangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional telah sesuai?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
2. Untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti mampu memberikan fungsi yang cukup berguna untuk beberapa pihak terlebih masyarakat dan mahasiswa, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan mampu menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk

memperdalam wawasan terkait analisa khususnya tentang Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur usia calon presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional. Ada beberapa manfaat yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam analisa Tinjauan filosofis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur usia calon presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi dan acuan pada penelitian – penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan pengetahuan terhadap peneliti.
- b. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, hasil penelitian ini utamanya sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi yang mengatur usia calon presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional.
- c. Bagi masyarakat, pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat tentang tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi yang mengatur usia calon presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum menurut Peter Mahmuda Marzuki penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. sebagai kegiatan *know how*, dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Problematika pokok dari ilmu hukum adalah”menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif. Disinilah kata Marzuki “dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut”.⁸

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tersebut. Dalam metode ini menjelaskan rancangan keseluruhan dari penelitian, termasuk beberapa tahapan yang harus dilalui, waktu pelaksanaan, sumber data yang digunakan, serta alat atau teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian akan diolah dan di analisis lebih lanjut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, baik dari sisi tingkatan atau hierarki aturan secara vertical, maupun dari segi keselarasan dan hubungan antar aturan yang sejajar,

⁸ Dr. Bactiar, S.H., M.H., “*Metode Penelitian Hukum*”, (Pamulang: UNPAM

PRESS, 2018), 48- 49.

maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).⁹ Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum.¹¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dengan melakukan telaah semua peraturan yang ada di perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu yang menjadi objek penelitian skripsi ini serta mengkaitkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

3. Jenis Data

Data yang peneliti lakukan dalam penulisan proposal skripsi ini yang meliputi:

- a) Data Primer adalah bahan hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi, putusan dari pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi milik negara.

⁹ Dr. Muhaimin, S.H., M.H., "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

¹⁰ Dr. Bactiar, S.H., M.H., "*Metode Penelitian Hukum*", 57.

¹¹ Dr. Muhaimin, S.H., M.H., “*Metode Penelitian Hukum*”, 56.

b) Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹²

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library reasearch*) yaitu suatu metode pengumpulan bahan dengan melalui membaca dan menelusuri literature-literatur yang berkaitan dengan judul yang dapat diambil dari beberapa perpustakaan maupun *searching* di internet.

Dalam jenis penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD 1945, UU tentang Pemilu No.7 Tahun 2017, Pasal 28 Ayat 1 UU 1945.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. Sugiono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap terpenting dalam proses penelitian, karena inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami cara yang tepat dalam mengumpulkan data, maka data yang diperoleh bisa jadi tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan.¹³

Metode yang digunakan sebagai bahan hukum oleh peneliti adalah dengan teknik studi dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa data, membaca, dan menelaah beberapa literature, buku, jurnal, artikel, dan

¹² Dr. Muhaimin, S.H., M.H., "*Metode Penelitian Hukum*",....9-60.

¹³ Dr. Bactiar, S.H., M.H., "*Metode Penelitian Hukum*",.....137-138.

perundang-undangan yang memuat informasi seputar putusan mahkamah konstitusi terkait usia calon presiden dan wakil presiden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ini.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*).¹⁴

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis hukum normative adalah sebagai berikut¹⁵:

- a) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data social maupun dari data hukum positif tertulis.
- b) Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c) Pembentukan standar-standar hukum
- d) Perumusan kaidah-kaidah hukum

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan menjadi pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur usia calon presiden dalam pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional.

Pertama, Muhammad Asyraf dari Universitas Islam Negeri Ar-

- ¹⁴ Dr. Bactiar, S.H., M.H., "*Metode Penelitian Hukum*",.....157
- ¹⁵ Dr. Muhaimin, S.H., M.H., "*Metode Penelitian Hukum*",....70

Raniry (Banda Aceh) dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2020 tentang Ambang Batas pencalonan presiden". Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu salah satu penelitian yang jenis spesifiknya sistematis, terencana, teratur dan terstruktur dengan jelas sejak pertama dilakukan penelitian hingga akhir penelitian. Asyraf menjelaskan bahwa pelaksanaan pasal 22 UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pilpres (*Presidential threshold*) terdapat banyak kontroversi di kalangan masyarakat dan akademisi. Dimana ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sehingga karena berbagai macam permasalahan tersebut banyak pihak yang sudah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang pemilu dalam ambang batas pencalonan presiden. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa permohonan para pemohon tidak diterima karena tidak terdapat hal diskriminatif oleh pasal tersebut karena sudah dijelaskan dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah dari partai maupun gabungan partai dan pemohon yang menganggap bahwa tidak bisa memilih banyak calon karena realisasi aturan ambang tersebut, dimana tidak inkonstitusial karena pemohon tetap bisa memilih calon yang dicalonkan tersebut¹⁶. Persamaan jurnal ini dengan peneliti yang meneliti adalah sama-sama menggunakan metode kepustakaan (*library research*)

¹⁶ Muhammad Asyraf, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2020 tentang Ambang Batas pencalonan presiden" *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 4

dan sama-sama menggunakan UU sebagai pegangan hukum. Perbedaannya, jurnal ini lebih mengkhususkan tentang pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pilpres, sedangkan peneliti yang meneliti permasalahan utamanya ada pada usia calon presiden dalam pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional.

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana dan Niluh Ketut Candra Kasih dengan judul “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen *Open Legal Policy* dan Etika Hakim Mahkamah Konstitusi” dalam artikel ini menjelaskan bahwa penelitian ini memfokuskan pada dissenting opinion yang diungkapkan oleh hakim-hakim MK terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ada dua kelompok besar dissenting opinion, yang pertama mempertanyakan proses hukum dan kedua adalah yang mempercayai batasan usia adalah open legal policy yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur¹⁷. Persamaan jurnal ini dengan peneliti yang meneliti adalah sama-sama menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan sama-sama menggunakan UU sebagai pegangan hukum. Perbedaannya jurnal ini lebih fokus pada dissenting opinion yang diungkapkan oleh hakim-hakim MK terkait putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana dan Niluh Ketut Candra Kasih, “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1(Des 2023), 192- 195.

Nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan peneliti yang meneliti lebih kepada usia calon presiden.

Ketiga, Awi Eko Cahyosaputro dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Analisis UU No.7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Syariah”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis penelitian ini dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data yang berhubungan dengan topik yang dibahas, lalu diuraikan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Menurut Eko, sebelum dilakukan amandemen, syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (pasal 169) masih ada beberapa poin yang dianggap tidak sejalan dengan teori Al – Mawardi. Hal ini terlihat dari isi undang-undang yang menetapkan kriteria calon presiden dan wakil presiden, antara lain: 1) memiliki pendidikan minimal setara sekolah menengah atas (SMA), 2) berusia paling sedikit 40 tahun, dan 3) belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali dalam jabatan sama¹⁸. Persamaan jurnal ini dengan peneliti yang meneliti adalah sama-sama menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan sama-sama menggunakan UU sebagai pegangan hukum. Perbedaannya jurnal ini lebih fokus pada syarat calon presiden dan wakil presiden dalam perspektif fikih syariah. Sedangkan peneliti yang diteliti lebih kepada usia calon presiden pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional.

¹⁸ Awi Eko Cahyosaputro, “Analisis UU Nomor.7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Syariah” *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019) 2.

Keempat, Muhammad Zainal Arifin “penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023” menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi berkedudukan *positive legislator* dengan menggunakan menggunakan penafsiran hukum futuris dan penafsiran sosiologis dalam putusan tersebut. Penafsiran ini berorientasi pada antisipasi atau penyesuain peristiwa. Mahkamah konstitusi berpendapat syarat usia dalam kandidat presiden dan wakil presiden harus memberikan peluang dan menghilangkan kesempatan pembatasan secara rasional adil dan akuntabel.¹⁹ Persamaan skripsi ini dengan peneliti yang meneliti adalah sama-sama menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan sama-sama menggunakan UU sebagai pegangan hukum. Perbedaanya skripsi ini lebih fokus pada penafsiran hukum mahkamah konstitusi yang berkedudukan *positive legislator* yang menggunakan penafsiran hukum futuris dan sosiologis, sedangkan penelitian yang meneliti lebih kepada putusan mahkamah konstitusi yang mengatur usia calon presiden dalam kerangka pembatatan hak politik dan keadilan konstitusional.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika penulisan ini penulis membaginya pada tiga bab dan beberapa sub bab, yaitu:

BAB Satu telah membahas tentang Pendahuluan, meliputi latar

¹⁹ Muhammad Zainal Arifin: Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024) 14.jj

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB Dua membahas tentang Kajian pustaka mengenai Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur usia calon presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusi.

BAB Tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai temuan dan pembahasan serta analisisnya.

BAB Empat membahas tentang kesimpulan mengenai keseluruhan dari isi pembahasan.

8. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan oleh untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran antara peneliti dengan pembaca, khususnya istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah kostitusi yang mengatur usia calon presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional”.

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata yaitu “tinjauan” dan “yuridis” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk

memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁰

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tinjauan filosofis adalah suatu pandangan yang sudah diselidiki berdasarkan filsafat.

b. Putusan MK

Putusan yang bersifat final dan mengikat berarti mau tidak mau putusan MK harus dilaksanakan. Tidak ada upaya hukum lanjutan atas MK. Yang berbunyi “Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi penjelasan pasal 10 ayat (1) putusan mahkamah konstitusi itu sifatnya final, artinya begitu dibacakan, langsung punya kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Tidak ada upaya hukum lanjutan lagi yang bisa dilakukan. Sifatnya final dan putusannya mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak.²¹

c. Pembatasan hak politik

Pembatasan secara operasional ditegaskan dalam 73 UU HAM menyatakan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum dan kepentingan bangsa.²² Hak politik itu adalah hak setiap orang yang secara hukum diakui untuk bisa ikut berperan dalam kekuasaan, misalnya mencalon sebagai pejabat, ikut pemilu,

²⁰ Widihartati Setiasih, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *Skripsi* (Universitas Darul ulum Islamic Centre sudirman Guppi (Undaris), 2020), 12.

²¹ Dri Utari Christina R. Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*,

(Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 38-39.

²² Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

atau dapat posisi dan kekayaan yang bisa bermanfaat buat dirinya sendiri. Dalam pasal 43 ayat (1) HAM juga dijelaskan bahwa setiap warga negara punya hak buat milih dan dipilih dalam pemilu, yang harus dilakukan dengan adil, bebas, rahasia, langsung, dan setara sesuai aturan hukum yang berlaku.

d. Keadilan konstitusi

Keadilan dalam konteks konstitusi dapat diartikan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai dari konstitusi, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan nilai ideal lainnya. Subtansi keadilan konstitusi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki tiga arti. **Pertama**, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. **Kedua**, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. **Ketiga**, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.²³